

ABSTRAK

Anak bukanlah miniatur orang dewasa, memidana anak melalui sarana penal, hanya akan membuat mereka lebih jahat daripada sebelumnya. Pidana yang berupa pemenjaraan berdampak buruk bagi perkembangan fisik, psikis, masa depan bahkan kelangsungan hidup anak. Menghadapkan anak dengan sistem peradilan pidana layaknya orang dewasa, tidaklah menyelesaikan masalah yang sebenarnya, permasalahan yang lain akan timbul seperti halnya prisonisasi, stigmatisasi dan masalah *over population* pada lembaga pemasyarakatan. Diversi sebagai alternatif pemecahan masalah dapat diupayakan pada tahap penyidikan, sehingga sedini mungkin anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dimungkinkan untuk tidak mengalami proses persidangan yang memakan banyak waktu dan juga biaya.

Penelitian ini dilakukan di Polres Banyumas guna mengetahui bagaimana aparat kepolisian dalam menerapkan upaya diversi, tujuan serta dasar hukum dan hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh aparat kepolisian dalam melaksanakan upaya diversi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat kepolisian yang menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Dalam pembahasan ditemukan bahwa yang menjadi tujuan diversi adalah untuk menghindarkan anak dari proses peradilan, stigmatisasi dan prisonisasi. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Banyumas identik dengan kenakalan remaja seperti pencurian, penganiayaan dan pengeroyokan. Dalam mengupayakan diversi Polres Banyumas telah menerapkan ketentuan Pasal 8 dan 9 UU SPPA yang menjamin kepentingan anak. Kendala Polres Banyumas dalam mengupayakan diversi adalah kendala *men power* dalam hal kualitas personil dan kuantitas personil yang mempengaruhi bagaimana diversi tersebut nantinya akan diupayakan terhadap ABH. Belum adanya Peraturan pemerintah juga menjadi kendala, sehingga aparat penegak hukum memiliki pandangan berbeda mengenai penerapan diversi. Pandangan masyarakat mengenai diversi juga menjadi kendala, karena pihak korban terkadang beranggapan pembedaan merupakan jalan terbaik.

Kata Kunci : Diversi, Polres Banyumas, Anak yang Berhadapan dengan Hukum

ABSTRACT

Children are not miniature adults, children through penal convict, will only make them worse than before. Criminal in the form of imprisonment is bad for their physical, psychological, future and their life. Arraign the children with criminal justice system like adult, not solve the real problem, other problems will arise such as prisonization, stigmatization and over population problems in correctional institution. Diversion program as alternative solutions to solve problems can be pursued at this stage of the investigation, as early as possible so that children in conflict with law are possible to not undergo the trial process that takes a lot of time and costs.

This research was conducted in Banyumas Police Resort to find out how the police in implementing the diversion program, purpose and legal basis and any barriers faced by the police in carrying out measures of diversion. This study uses a sociological juridical research with data collection techniques obtained through direct interviews with police officers who handle criminal offenses committed by children and literature study. Data analysis was conducted using qualitative descriptive analysis.

In the interview was found that the objectives of diversion is to prevent children from judicial proceedings, stigmatization and prisonization. Criminal offenses committed by children in the jurisdiction of Banyumas Police Resort synonymous with juvenile delinquency such as theft, assault and beatings. In Banyumas Police seek diversion has been applying the provisions of Articles 8 and 9 of juvenile justice system that guarantee the interests of the child. Banyumas Police Resort constraints are an obstacle in seeking diversion power of men in terms of quality and quantity of personnel personnel that affect how the diversion will be pursued against the children in conflict with law. The absence of government regulation is also an obstacle, so that law enforcement authorities have different views on the implementation of diversion program. Community views regarding the diversion is also an obstacle, because the victims are sometimes thought of punishment is the best way.

Keywords: Diversion, Banyumas Police Resort, Children In Conflict With Law